

Judul : Setelah gugurnya tiga prajurit dalam misi perdamaian, wacana penarikan pasukan TNI di Lebanon menguat

Tanggal : Minggu, 12 April 2026

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 2

Setelah Gugurnya Tiga Prajurit Dalam Misi Perdamaian

Wacana Penarikan Pasukan TNI Di Lebanon Menguat

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah tegas terkait kelanjutan misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Melalui unggahan di media sosial X pada Minggu (5/4/2026), SBY mengaku sangat terkejut saat memberikan penghormatan terakhir kepada tiga prajurit yang gugur. Yakni Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon. "Hati saya ikut bergetar," ujar SBY. SBY menilai, situasi keamanan di wilayah penugasan semakin

berisiko dan meminta PBB untuk mengevaluasi. Bahkan, menghentikan sementara misi UNIFIL demi keselamatan pasukan penjaga perdamaian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, pemerintah Indonesia saat ini masih memprioritaskan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Ia menjelaskan, pasukan penjaga perdamaian tidak dipersiapkan untuk operasi tempur.

"Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk *peace making*. Perlengkapan dan latihan mereka adalah untuk menjaga perdamaian dalam situasi yang sudah kondusif," ujar Sugiono di salah satu program

televisi pada Senin (6/4/2026). Sugiono juga menekankan, misi tersebut merupakan mandat dari PBB, sehingga pihaknya mendorong evaluasi serius terhadap aspek keselamatan pasukan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai, gugurnya tiga prajurit TNI bukanlah insiden biasa. "Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian khusus negara," ujarnya kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).

Ia meminta pemerintah membahas secara intensif dengan DPR terkait keberlanjutan penugasan TNI dalam misi UNIFIL. Salah satu opsi yang diusulkan adalah penarikan seluruh pasukan Indonesia dari Lebanon.

Menurut Oleh, kejadian ini menjadi peringatan penting bagi Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian internasional, terutama jika ke depan ada rencana pengiriman pasukan ke wilayah konflik lain seperti Gaza.

Wacana evaluasi hingga penarikan pasukan TNI dari Lebanon semakin menguat pascainsiden tersebut. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan final.

Sejumlah pihak menilai, langkah apa pun yang diambil harus mempertimbangkan keselamatan prajurit, komitmen internasional Indonesia, serta situasi keamanan di wilayah konflik.

Direktur Eksekutif Global Insight

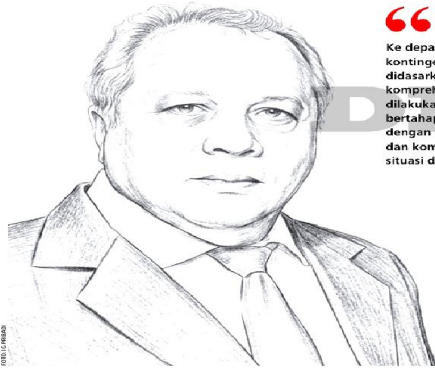
Forum (GIF), Teuku Rezasyah termasuk yang mendukung Pemerintah Indonesia mengevaluasi keberadaan pasukan TNI di UNIFIL di Lebanon.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, penarikan pasukan tidak bisa dilakukan tergesa-gesa. "Proses pemulangannya harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu," ungkap Dave Laksono pada *Rakyat Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan Dave Laksono dan Teuku Rezasyah terkait wacana mengevaluasi dan penarikan pasukan TNI di Lebanon, berikut wawancaranya.

TEUKU REZASYAH, Direktur Eksekutif GIF

Momentum Tepat Untuk Evaluasi



“Ke depan, pengiriman kontingen harus didasarkan pada studi komprehensif. Yaitu, dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas situasi di lapangan.”

Apakah keberadaan pasukan perdamaian Indonesia di Lebanon perlu dievaluasi?

“Ya, ini merupakan saat yang tepat untuk mengevaluasi keterlibatan Indonesia, baik dalam United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) maupun dalam International Stabilization Force (ISF).

Mengapa evaluasi tersebut penting dilakukan sekarang?

Meskipun TNI menjalankan mandat PBB dengan baik di UNIFIL, namun tingkatan ancaman terhadap keselamatan personel sangat tinggi. Jika Indonesia terlibat dalam ISF, risiko tersebut berpotensi meningkat, karena dinamika konflik yang lebih kompleks.

Apakah membuat keterlibatan dalam ISF lebih berisiko?

ISF berada di bawah kepemimpinan Amerika Serikat yang saat ini aktif dalam konflik di Timur Tengah. Dalam situasi tersebut, keputusan politik pemimpin seperti Donald Trump berpotensi memengaruhi pengerahan pasukan, termasuk dari negara lain.

Apakah Indonesia perlu menarik pasukan dari Lebanon?

Penarikan pasukan sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Keputusan harus didasarkan pada kajian mendalam dan melibatkan koordinasi dengan negara-negara lain yang tergabung dalam UNIFIL.

Apakah pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPR RI?

Ya, sangat penting. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan DPR RI, karena keputusan strategis seperti penarikan pasukan dapat berdampak luas, termasuk potensi diikuti negara lain. Kekesongan pasukan justru bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu seperti Israel.

Apakah langkah ke depan yang sebaiknya dilakukan Indonesia?

Ke depan, pengiriman kontingen harus didasarkan pada studi komprehensif. Yaitu, dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan tingkat risiko dan kompleksitas situasi di lapangan. ■REN

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi I DPR

Penarikan Pasukan Tidak Bisa Sekaligus



“Keputusan penarikan harus mempertimbangkan banyak hal, terutama situasi keamanan. Selain itu, keputusan ini bukan kewenangan saya, melainkan Pemerintah, khususnya Presiden.”

Ada desakan agar pasukan UNIFIL di Lebanon dievaluasi dan ditarik. Apa pandangan Anda?

Mandat UNIFIL, sejauh saya, memang akan segera berakhir pada tahun 2026. Jadi secara proses, sebenarnya sudah mulai mengarah ke tahap penarikan. Namun, penarikan pasukan tidak bisa dilakukan secara langsung atau sekaligus.

Mengapa pasukan tidak bisa langsung ditarik?

Karena ada banyak peralatan berat milik Indonesia yang masih berada di sana. Peralatan tersebut disewa oleh PBB, seperti kendaraan taktis dan perlengkapan lainnya yang sudah

digunakan bertahun-tahun. Proses pemulangannya harus dilakukan secara bertahap dan membutuhkan waktu.

Apakah TNI perlu ditarik dari Lebanon saat ini?

Keputusan penarikan harus mempertimbangkan banyak hal, terutama situasi keamanan. Jika pada Desember kondisi sudah mereda, Israel menarik pasukannya, dan kelompok seperti Hamas atau Hizbullah sudah tidak melakukan serangan, maka situasi bisa dianggap lebih stabil. Namun, keputusan ini bukan kewenangan saya, melainkan Pemerintah, khususnya Presiden.

Bagaimana pandangan terkait

insiden yang menimpa prajurit Indonesia di Lebanon?

Ada teman bahwa satu insiden disebabkan serangan mortar dari Israel, dan satu lagi akibat ranjau yang dipasang oleh Hizbullah. Ranjau tersebut dipasang di jalur patroli yang biasa dilalui prajurit kita tanpa sepengetahuan mereka. Ini sangat disayangkan dan harus ada kejelasan serta pertanggungjawaban.

Apakah diharapkan dari Pemerintah terkait insiden tersebut?

Tidak cukup hanya dengan samunan. Harus ada keadilan, kejelasan, dan tindakan tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas jatuhnya korban dari prajurit Indonesia. ■REN